

PENGENALAN PERENCANAAN PROGRAM DESA BERBASIS BUKTI DI DESA MURTAJIH KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN PAMEKASAN

Nurul Jannatul Firdausi

Prodi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, nuruljf@unusa.ac.id

Agus Aan Adriansyah

Prodi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

Abstrak

Desa telah mendapat kewenangan dalam mengatur perkembangan dan pembangunan secara mandiri sejak Undang-Undang No 6 Tentang Desa Tahun 2014 disahkan. Peran pemerintah desa semakin besar sejak pemerintah pusat juga mengalokasikan dana desa pada tahun 2015. Desa menjadi harapan pemerintah untuk percepatan pencapaian pembangunan nasional. Peran perencanaan berbasis bukti sangat diperlukan oleh desa untuk menjamin ketercapaian efektivitas program sesuai tujuan dan harapan pemerintah serta kebutuhan dan kerentanan masyarakat desa. Pengabdian masyarakat dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan simulasi dengan tujuan untuk memberikan wawasan kepada peserta tentang perencanaan berbasis bukti. Peserta pengabdian masyarakat adalah kader dan perangkat desa. Pengukuran pengetahuan menggunakan *pretest-postest* dengan aspek yang diukur peran perencanaan terhadap anggaran, proses dan sumber data untuk perencanaan serta pelaksanaan perencanaan dan evaluasi. Hasil *postest* menunjukkan mayoritas pengetahuan peserta meningkat. Sosialisasi efektif secara statistik dalam meningkatkan pengetahuan peserta ($\text{sig. } 0,001 < \alpha = 0,05$).

Kata Kunci: Perencanaan Berbasis Bukti, Dana Desa, Pembangunan Desa

Abstract

The village has been authorized to regulate an development and growth independently since Law No. 6, 2014 about village was ratified. The role of village government has increased since the central government has also allocated village funds in 2015. Villages are the government's hope for accelerating an achievement of national development. The role of evidence-based planning is urgently needed by the villages to ensure the achievement of program effectiveness in line with government goals and expectations and the needs and vulnerabilities of rural communities. Community development is implemented through socialization and simulation and the aim to provide insight to participants about evidence-based planning. Participants of community development are cadres and village staff Measurement of knowledge using pretest-postest with aspects measured about role of planning on budget, process and data sources for planning also implementation of planning and evaluation. Postest results show the majority of participants' knowledge increases. Socialization is statistically effective in increasing participants' knowledge ($\text{sig } 0.001 < \alpha = 0.05$).

Keyword: Evidence-Based Planning, Village Fund, Village Development

PENDAHULUAN

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka desa memiliki kewenangan untuk mengatur perkembangan dan pembangunan masyarakat desa. Undang-undang tersebut menjadi dasar yang menjelaskan kedudukan dan relasi desa dengan daerah dan pemerintah

meliputi aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi desa (Letty, 2016). Pembangunan desa tentu memerlukan dukungan dana. Selama ini sumber dana operasional desa dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah, alokasi APBN, Alokasi Dana Desa.

Bagian dari DPRD Kab/Kota, Bantuan keuangan dari APBD, hibah/sumbangan dari pihak ketiga dan sumber dana sah lainnya (Kementrian Keuangan RI, 2017). Pemerintah menambahkan sumber dana lain yaitu dana desa pada tahun 2015. Besarnya dana yang dikelola oleh desa tentu harus diimbangi dengan perencanaan yang baik dan mempertimbangkan masalah prioritas yang muncul di desa. Sehingga efektivitas program dapat sesuai dengan tujuan dan harapan pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional.

Perencanaan menjadi tolak ukur kesesuaian serta efektivitas program maupun anggaran sehingga secara luas dapat berdampak terhadap peningkatan kondisi masyarakat, baik pada aspek kesejahteraan, kesehatan maupun pendidikan. Perencanaan yang baik dapat berpengaruh secara signifikan untuk efisiensi anggaran dan peningkatan kinerja suatu program (Ahmari & Amar, 2014).

Perencanaan berbasis bukti sebenarnya bukan hal baru untuk diaplikasikan di Indonesia karena telah diatur dalam UU RI No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan berbasis bukti merupakan penyusunan perencanaan yang berdasarkan pada data dan informasi yang tepat sesuai kondisi setempat (Sekretaris Negara RI, 2004). Masalah yang dihadapi terkait

perencanaan adalah lemahnya implementasi perencanaan berbasis bukti di berbagai sektor.

GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Murtajih. Desa ini merupakan salah satu desa di Kecamatan Pademawu, Pamekasan. Desa Murtajih terdiri atas 8 dusun Dusun Murtajih, Soloh Timur, Soloh Dajah, Soloh Laok, Nanggirik, Oberan, Telaga Sari dan Pao Gading. Luas wilayah desa ini adalah 323,183 Ha dengan bentang wilayah seluruhnya adalah daratan. Ketinggian daratan dari permukaan laut adalah 15 meter. Durasi musim penghujan rata-rata 5 bulan dengan curah hujan 36 mm dan suhu udara sekitar 28-32 °C. Jumlah Kepala Keluarga (KK) di Desa Murtajih sebanyak 1822KK dengan jumlah total 5945 jiwa. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2890 dan sebanyak 3055 penduduk perempuan. Sebagian besar penduduk di Desa Murtajih bermata pencaharian sebagai petani (484 orang), namun terdapat penduduk yang belum bekerja cukup tinggi sebanyak 649 orang (12%).

Alasan pemilihan masyarakat sasaran di desa ini sebagai berikut:

1. Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM). Selama

3 tahun terakhir IPM Kabupaten Pamekasan (Tahun 2013: 62,27; Tahun 2014: 62,66; Tahun 2015:63,10) tertinggi dibandingkan 4 kabupaten lainnya di Pulau Madura, namun masih cukup rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Jawa Timur (BPS Jatim, 2015).



Gambar 1. Peta Desa Murtajih, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan

2. Sumber Daya Manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan manajemen desa. Kemampuan perangkat desa dalam menggunakan komputer sangat membantu dalam manajemen desa terutama dalam pelaksanaan manajemen desa. Kemampuan perangkat desa dalam menggunakan komputer sangat membantu dalam manajemen desa terutama dalam pengelolaan dan penyediaan data. Jumlah perangkat desa sebanyak 14 orang dan hanya 7 orang perangkat desa yang dapat mengoperasikan komputer yaitu *microsoft*

word. Perangkat desa yang dapat mengolah data menjadi informasi sangat kurang. Hasil observasi dokumen profil desa, pengolahan data desa masih dalam bentuk data kasar (*raw data*) yang kurang informatif. Selain itu, perangkat desa belum mendapatkan pengalaman pelatihan tentang perencanaan. Hanya kepala desa yang pernah mendapatkan informasi dalam forum ilmiah tentang perencanaan.

3. Berdasarkan hasil penelitian Firdausi, *et.al*, (2017) penyusunan perencanaan desa sudah melibatkan masyarakat dalam kegiatan Musyawarah Dusun (Musdus). Data yang digunakan dalam penyusunan perencanaan desa menyesuaikan kebutuhan masyarakat dalam musyawarah dan data desa yang dimiliki tidak digunakan sebagai pendukung perencanaan. Desa belum membuat dokumen *planning of action* (POA). Acuan pelaksanaan program adalah dokumen rancangan anggaran. Tidak semua data pelaksanaan kegiatan desa dilaporkan dan diolah, misal kegiatan Posyandu. Desa belum memiliki dokumen POA (*Plan of Action*) yang terstandar berdampak pada kegiatan evaluasi yang hanya melihat keberhasilan pada aspek hasil.

METODE

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dengan topik “Pengenalan Perencanaan Program Desa Berbasis Bukti di Desa Murtajih Kabupaten Pamekasan” diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman perangkat desa dan pihak terkait lainnya dalam penyusunan perencanaan program desa
2. Memberi pengetahuan baru bagi perangkat desa dan pihak lainnya terkait pentingnya mengolah data menjadi informasi penting dalam perumusan perencanaan desa.
3. Meningkatkan kesadaran perangkat desa untuk menyusun perencanaan sesuai prioritas masalah di desa.

Pelaksanaan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini meliputi beberapa bagian atau tahapan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Survei kelompok sasaran

Pada tahap pertama untuk mendapatkan informasi tentang lokasi dan aspek lain di wilayah sasaran.

2. Persiapan Sarana dan Prasarana

Tahap ini merupakan tahap yang mempersiapkan sarana dan prasarana yang akan mendukung kegiatan ini. Persiapannya adalah mengenai tempat dan lokasi yang akan kami gunakan untuk

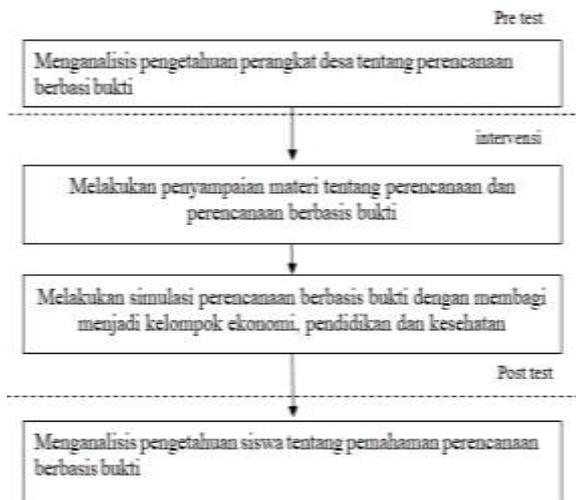
kegiatan. Sarana yang lainnya akan dipersiapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan.

3. Pelaksanaan kegiatan aksi

Muatan program yang paling penting dalam program ini sebagai bentuk evaluasi perencanaan yang sudah dilaksanakan dan memberikan wawasan baru bagi perangkat desa dan pihak terkait lainnya tentang pentingnya menyusun perencanaan berbasis bukti.

4. Evaluasi

Pada tahap evaluasi, anak-anak akan diberikan *feedback* tentang program yang telah dilaksanakan. Hal ini akan menjadi pertimbangan bagi kegiatan kami agar bermanfaat lagi untuk masyarakat. Evaluasi dirancang dengan membandingkan kondisi pengetahuan sebelum dan setelah intervensi. Pemotretan pengetahuan peserta pengabdian masyarakat menggunakan kuesioner individu yang berupa *pretest* dan *posttest*. Analisis secara statistik dengan bantuan program SPSS dengan jenis uji dependent t-test atau *Paired t-test* ataupun dengan uji nonparametric yaitu *Wilcoxon t-test*.



Gambar 2. Kerangka Operasional Pengabdian Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi tentang Perencanaan Program Desa Berbasis Bukti di Desa Murtajih Kecamatan Pademawu Pamekasan. Pengenalan perencanaan berbasis bukti kepada perangkat desa dan kader bertujuan untuk meningkatkan wawasan terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan/program desa mengingat saat ini desa menjadi garda terdepan percepatan pembangunan, baik dari segi ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang diharapkan oleh pemerintah. Pengabdian masyarakat ini juga mengajak peserta untuk melakukan simulasi penyusunan perencanaan berencana berbasis bukti. Proses penyusunan perencanaan berbasis bukti ini melalui pengkajian terhadap temuan masalah, intervensi yang sudah dilakukan, hambatan dalam intervensi, strategi alternatif intervensi, target, biaya

yang dibutuhkan, strategi prioritas dan metode evaluasi yang dilakukan. Berikut gambaran kegiatan pengabdian masyarakat.



Gambar 4. Pemaparan Materi Perencanaan Berbasis Bukti

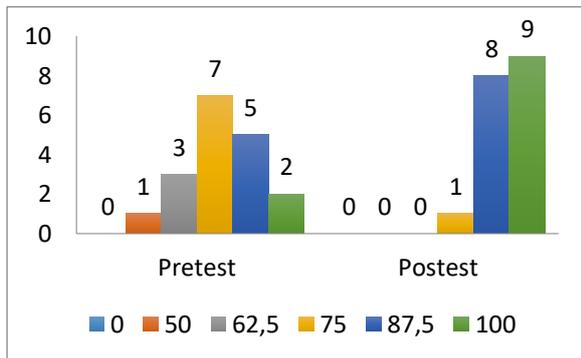
luaran yang ditargetkan dalam pengabdian masyarakat ini adalah peningkatan pengetahuan peserta terkait perencanaan berbasis bukti. Pengetahuan merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu obyek tertentu.



Gambar 5. Pendampingan Simulasi Perencanaan Berbasis Bukti

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, para peserta diberikan penyuluhan berupa sosialisasi dana desa. Penilaian pengetahuan

dari para peserta dilakukan dengan metode *pretest* dan *posttest*.



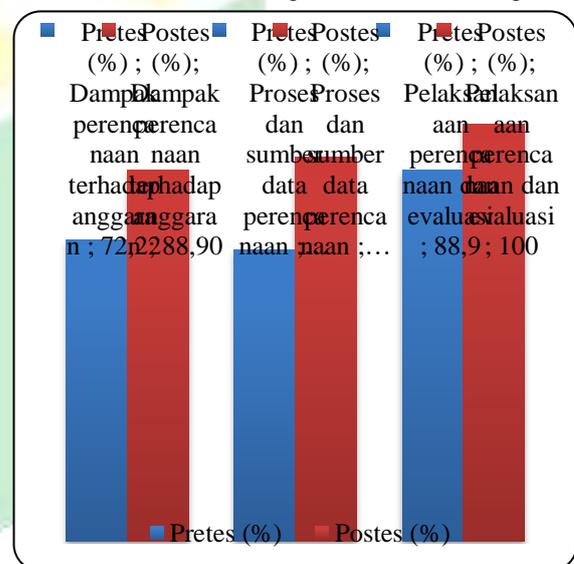
Gambar 6. Perubahan Pengetahuan Peserta Pengabdian Masyarakat Berdasarkan Hasil Pretest-Posttest

Hasil *pretest* dan *posttest* dinilai berdasarkan skor jawaban peserta. Nilai pretes peserta yang memperoleh nilai diatas 75 cukup banyak sebanyak 14 orang (77,8%). Hasil *pretest* secara umum menggambarkan bahwa pengetahuan awal mengenai perencanaan berbasis bukti sudah cukup baik. Hasil *posttest* dapat dilihat skor pengetahuan peserta tidak ada yang di bawah 75. Hasil ini menggambarkan pengetahuan para peserta mengenai perencanaan berbasis bukti sesuai sosialisasi sudah terjadi peningkatan yang lebih baik dibandingkan *pretest*. Hasil identifikasi juga menunjukkan 83,30 % peserta (15 orang) meningkat pengetahuannya.

Isi pertanyaan dalam kuesioner terdiri dari 3 aspek yaitu peran perencanaan terhadap anggaran, proses dan sumber data untuk perencanaan serta pelaksanaan perencanaan dan evaluasi. Pengetahuan

terendah peserta pada aspek proses pelaksanaan perencanaan dan sumber data yang dapat digunakan untuk perencanaan. Sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan perencanaan selama ini belum menggunakan data sebagai dasar perencanaan. Setelah pelaksanaan postes pengetahuan peserta terkait proses dan sumber data perencanaan meningkat hingga 92,2%. Secara keseluruhan pengetahuan peserta pada 3 aspek yang diukur menunjukkan peningkatan.

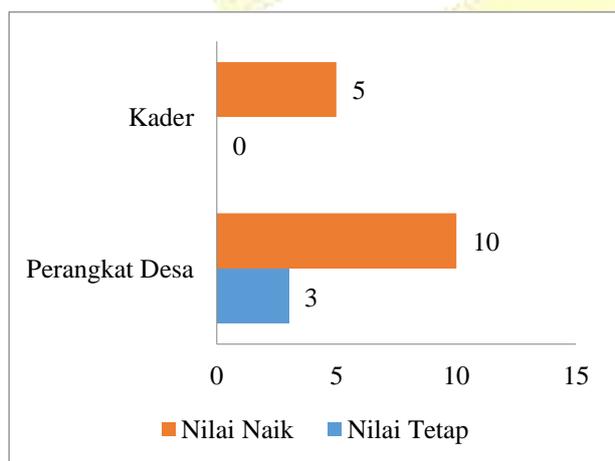
Gambar 5. Gambaran Pengetahuan Peserta Pengabdian



Masyarakat Tentang Perencanaan

Pengetahuan seseorang dapat diperoleh melalui proses belajar. Pengetahuan seseorang dapat berubah dan berkembang sesuai kemampuan, kebutuhan, pengalaman dan tinggi rendahnya mobilitas materi informasi tentang lingkungannya. Akses untuk mendapatkan informasi juga mempunyai peran yang tidak kalah penting

untuk meningkatkan pengetahuan. faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan bisa berasal dari faktor internal dan faktor eksternal, diantaranya adalah posisi atau jabatan. Sosialisasi ini melibatkan 2 jenis peserta yaitu perangkat desa dan kader. Berdasarkan hasil *pretest* dan *posttest* pengetahuan perangkat desa lebih baik dibandingkan kader. Akan tetapi, perubahan tingkat pengetahuan kader setelah mendapat sosialisasi lebih baik.



Gambar 6. Gambaran Perubahan Tingkat Pengetahuan pada Kader dan Perangkat Desa

Efektivitas sosialisasi terhadap pengetahuan peserta tentang perencanaan berbasis bukti diukur melalui evaluasi *pretest* dan *posttest* serta membandingkan hasil evaluasi *pretest* dan *posttest*. Sebelum dilakukan uji efektivitas pemberian sosialisasi dalam perubahan peningkatan pengetahuan. Hasil uji Wilcoxon menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 dan lebih kecil dari nilai alfa (α) = 0,05

artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara evaluasi *pretest* dan *posttest*. Rata-rata nilai evaluasi *posttest* adalah 93,06 dan lebih baik daripada rata-rata nilai evaluasi *pretest* yaitu 77,78. Hal ini menandakan adanya efektivitas sosialisasi dalam meningkatkan pengetahuan.

KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui sosialisasi dan simulasi penyusunan perencanaan berbasis bukti bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Pengetahuan diukur melalui *pretest* dan *posttest* yang mengacu pada tiga hal yaitu peran perencanaan terhadap anggaran, proses dan sumber data untuk perencanaan serta pelaksanaan perencanaan dan evaluasi. Pengetahuan terendah peserta pada aspek proses pelaksanaan perencanaan dan sumber data yang dapat digunakan untuk perencanaan. Hasil *posttest* menunjukkan pengetahuan peserta pada 3 aspek tersebut meningkat. Sosialisasi ini diikuti oleh perangkat desa dan kader. Pengetahuan perangkat desa lebih baik, namun tingkat perubahan pengetahuan kader lebih baik. Sosialisasi ini efektif untuk meningkatkan pengetahuan peserta.

REFERENSI

Ahmari, A., & Amar, S. 2014. Pengaruh Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian Anggaran terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Kepulauan

Mentawai. *Riset Manajemen Bisnis Dan Publik*, 2(3), 1–12.

Firdausi, N. J., Adriansyah, A. A., & Rhomadoni, M. N. 2017. *Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Kesehatan Masyarakat Di Desa Murtajih Kabupaten Pamekasan*. Surabaya.

Badan Pusat Statistik Jatim. 2015. Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur 1999, 2002, 2004- 2015. Retrieved August 20, 2017, from <http://jatim.bps.go.id/link>

TabelStatis/view/id/342

Letty, N. L. A. 2016. Otonomi Desa dan

Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211.

Kementerian Keuangan RI 2017. Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017.

Tim Penyusun. 2016. *Profil Desa Murtajih*. Pamekasan.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia. Retrieved from <http://bsn.go.id/uploads/download/uu-2520041.pdf>

The logo of UNUSA is a 3D cube with a yellow top face and green side faces. The letters 'UNUSA' are printed in a light green, serif font across the front face of the cube.

UNUSA